

346.074
WAH
R



DAMPAK PELAKSANAAN KONTRAK ARENDS BAGI
PETANI DI DAERAH SIDOARDJO PADA AWAL
ABAD XX

Oleh:

Drs. S. Sigit Wahyudi, MS

FAKULTAS: Sastra
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Dibiayai oleh Dana DPP Universitas Diponegoro Semarang,
Tahun Anggaran 1994 / 1995, berdasarkan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Tugas Penelitian Universitas Diponegoro, No:
615/PT09.H8/N/1994 Tanggal 23-8-1994

LEMBAGA PENELITIAN UNDIP

1995

RINGKASAN

Pada awal abad XX di wilayah Sidoardjo, residen-
si Surabaya merupakan perkebunan tebu dengan 15 pabrik
gulanya. Pabrik gula pada saat itu merupakan tulang
punggung perekonomian pemerintah Hindia Belanda, sebab
gula sebagai primadona ekspor yang dapat menghasilkan
keuntungan yang sangat besar.

Dalam menjamin adanya kepastian hukum dan kema-
napan dalam perluasan areal perkebunan tebu, pemerin-
tah perlu membuat aturan tentang kontrak yang mengatur
persewaan tanah. Kontrak itu dicanangkan oleh pemerin-
tah di bawah anjuran seorang residen L.A Arends, maka
perjanjian itu dikenal dengan nama Kontrak Arends yang
tertuang dalam Staadblad No. 240. Isi kontrak ini se-
benarnya berisi aturan yang sangat menguntungkan peta-
di dalam meringankan pembayaran pajak di luar campur
tangan aparat tradisional. Namun dalam pelaksanaannya
mendapat campur tangan aparat tradisional terutama lu-
rah. Mereka sebagai pemeran ganda yang tentu saja me-
ngakibatkan kemiskinan dan penderitaan petani.

Walaupun perkebunan tebu dan pabrik gulanya te-
lah mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi peme-
rintah Hindia Belanda, namun kehadirannya selalu bera-
kibat buruk bagi masyarakat di sekitarnya dan petani
akan menjadi korbannya. Sangatlah pantas apabila pere-
konomian petani di daerah Sidoardjo adalah semu, sebab
dari luarnya nampak makmur namun kehidupannya sangat di-
tentukan oleh nilai kredit. Bagaimana dikatakan makmur
kalau sepertiga dari tanah garapannya selalu disewakan
kepada pabrik terus menerus, apalagi kebahagiaan untuk
makan setiap haripun merasa susah.

SUMMARY

In the early 20 th century in Sidoardjo area, Surabaya residence was a sugercane plantation with its 15 suger factories. At that time, suger faktori- es were the backbone of Dutch colony's economy, since suger as a prime export could make considerable profits.

To guarantee the legal certainty and stability for extending sugercane plantation areas, the colonial goverment needed to make contract rules regulating land leases. The contract was issued by the goverment based on a Surabaya resident's recommendati- on, L.A. Arends, so the contract was known as Arends contract, expressed in Staadblad No. 240. The con- tract contained rules which were benefecial for pe- asant in reducing tax payment out of the traditional officer, aspecially lurah (village chiefs) inter- vened the tax payment. As double blakmailers, they couosed poverty and suffering for the peasants.

Eventhough the sugercane plantation and its suger industries had given a lot of profits for the Dutch colony, its presence always made the people around the peasants suffer. It would be appropriate to say that the peasant's economy in Sidoardjo was false, because the peasants seemed prosperous from outside, but their life actually depended on credit value.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankanlah saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt., yang telah memberikan ijin dan ridlonya dalam penggarapan penelitian yang berjudul "Dampak Pelaksanaan Kontrak Arends Bagi Petani di Daerah Sidoarjo Pada Awal Abad XX". Saya sadar bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, hal ini dikarenakan terbatasnya waktu, sarana dan prasarana.

Selama pengumpulan data, informasi, dokumen atau dalam studi leteratur dalam penelitian ini tentunya banyak membutuhkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas kesemuanya ini, maka tidak lupa saya ucapkan terima kasih tada terhingga kepada:

1. Lembaga penelitian Universitas Diponegoro yang telah memberikan dana, bimbingan dan kesempatan dalam penelitian ini.
2. Dekan Fakultas Sastra yang telah memberikan dorongan moral dan spiritual dalam pelaksanaan penelitian ini.
3. Pimpinan dan staf baik Arsipnas RI dan Pustakana RI di Jakarta.
4. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu - persatu.

Saya hanya dapat mengharap, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan.

Semarang, 31 Agustus 1995

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tinjauan Pustaka	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Teori dan Pendekatan	6
B. Scope Spasial dan Temporal	6
BAB III. HASIL DAN BAHASAN	
A. Keadaan Geografis	7
B. Sistem Perekonomian Penduduk	8
C. Kontrak Arends dan Dampaknya Terhadap Petani	9
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	20
B. Saran-Saran	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	28

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir abad XIX bagi sejarah masyarakat di Indonesia, mengalami abad perubahan yaitu berubahnya masyarakat Indonesia dari sifat tradisional ke bentuk masyarakat modern. Proses modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan di pedesaan Jawa. Berbagai perubahan yang terjadi antara lain proses lenyapnya berbagai institusi tradisional dan munculnya institusi sosial baru hingga awal abad XX.

Berbagai perubahan yang terjadi dikarenakan diberlakukannya intensifikasi politik kolonial Belanda melalui proses birokratisasi, komersialisasi, industrialisasi, edukasi, inovasi dan renovasi pertanian yang berakibat bagi daerah pedesaan. Terjadi perubahan di sektor kehidupan pertanian yang bersifat sistemik melalui kebijakan ekonomi ke arah produksi yang kapitalis (Immanuel Wallerstein: 1977, 74-75). Berbagai perubahan sosial itu terjadi karena munculnya kondisi sosial baru dalam masyarakat karena berbagai faktor: (W.F. Wertheim: 1956, 38-50). Walaupun pembaharuan ini terjadi terutama di Jawa, namun hal tersebut merupakan awal bagi beberapa bagian kepulauan di Indonesia (Anne Booth dan William J.O, Malley: 1988, 197).

Melalui perubahan sistem pertanian yang bersifat subsistensi ke arah sistem pertanian yang mampu mengekspor hasil-hasil pertanian, maka perkebunan merupakan aspek yang terpenting untuk dibicarakan dalam konteks perubahan tersebut dalam kaitannya dengan kehidupan perekonomian di Wilayah Hindia Belanda saat itu khususnya di daerah Sidoardjo, residensi Surabaya. Berbagai tanaman agro industri yang sedang berkembang itu, perkebunan

tebu merupakan primadona ekspor yang dapat membawa keuntungan finansial bagi pemerintah Hindia Belanda. Namun dengan meluasnya jaringan perkebunan tebu dan berdirinya berbagai pabrik gula di daerah - daerah , ternyata berakibat buruk bagi daerah-daerah sekitarnya. Tanpa dukungan tanah dan tenaga kerja, perkebunan tebu dan pabrik gula ini tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam merekrut tanah dan tenaga kerja ini pihak onderneming terpaksa harus bekerjasama dengan para penguasa tradisional. Maka antara onderneming dengan kaum feodal pribumi ini terjadilah hubungan yang sangat menguntungkan yang disebut hubungan simbiose - mutualistis. Inipun nampaknya tidak cukup menjamin kepentingan pemerintah Hindia Belanda, maka perlu dibuat aturan untuk menegakan kewibawaan pemerintah dan kepastian hukum dalam sewa-menywa tanah untuk areal perkebunan misalnya dengan sistem Kontrak Arends ini.

Hubungan simbiose mutualistis ini ternyata berakibat makin menguatnya sistem feodal, meskipun beamtenstaat yang merupakan instrumen bagi tuntutan birokrasi pemerintah kolonial juga memperlihatkan bahwa semua kebijakan yang diarahkan bagi kepentingan eksploitasi agraris itu merupakan periode kolonial yang sempurna apabila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya (G.J Resink: 1968, 103-105 dan S. Sigit Wahyu - di: 1993, 4). Di daerah pedesaan Jawa nampak sekali bagaimana posisi lurah yang sebelumnya berfungsi sebagai primus inter pares kemudian berubah menjadi alat dan kaki tangan termasuk kepentingan perkebunan tebu dan pabrik gulanya untuk selalu mengusahakan tanah dan tenaga kerja yang murah bagi berlangsungnya kehidupan perekonomian perkebunan (Loekman Soetrisno: 1986, 3-4).

Penelitian ini berjudul, Dampak Pelaksanaan Kontrak Arends Bagi Petani di Daerah Sidoardjo Pada Awal Aabad XX. Permasalahan yang timbul adalah, mengapa daerah Sidoardjo yang relatif subur yang di tandai dengan padatnya penduduk, pengairan teknis yang sangat teratur dari sungai Brantas, tanahnya subur sehingga kegagalan panen jarang terjadi, sarana transportasi baik sekali, namun terjadi kemiskinan ?. Maka hipotesa sementara yang dapat ditarik adalah hadirnya perkebunan tebu dan pabrik gulanya yang merupakan sarana eksploitasi dari pemerintah Hindia Belanda.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian menggunakan sumber-sumber tertulis baik yang bersifat primer dan skunder. Sumber primer adalah sumber tertulis yang disusun berdasarkan pengamatan langsung atas kejadian, sedangkan sumber sekunder adalah sejumlah karya sejarah yang menceritakan peristiwa Sidoardjo berdasarkan sumber primer. Banyak buku-buku yang relevan dan dapat dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain:

Pertama buku karangan James C. Scoot, yang berjudul Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Buku ini sangat besar artinya bagi penulisan ini terutama dalam kaitannya untuk memahami perilaku ekonomi petani. Oleh James C. Scoot digambarkan bahwa petani adalah merupakan konsumen subsistensi yang taraf kehidupannya selalu berada diambang baik menyangkut permasalahan makanan, pakaian atau tempat tinggal. Menurutnya bahwa setiap bentuk eksploitasi atau tindakan perampasan milik mereka akan dapat mendorong timbulnya ketegangan yang berakhir pada

penberontakan (James C. Scoot: 1983).

Buku kedua karangan Yijiro Hayami dan Masao Kikuchi berjudul, Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan kelembagaan di Asia . Uraian di dalamnya mengenai pelapisan sosial kemasyarakatan desa sebagai berikut: petani gogol adalah petani pemilik tanah baik sawah maupun pekarang. Mereka memiliki hak yang dimiliki oleh anggota komunitas dan mereka juga berkewajiban memikul semua beban. Kedua - petani stengah gogol, mereka memiliki pekarangan dan rumah tetapi tidak memiliki sawah. Ketiga yaitu kelompok orang menumpang, mereka hanya memiliki sawah . Terakhir kelompok wong nusup mereka tidak memiliki tanah, rumah dan sebagai pemondok di rumah orang lain. (Yijiro Hayami dan Masao Kikuchi: 1987, 183-244).

Buku ketiga karangan Karl J. Pelzer, "The Agricultural Foundation" dalam Bruce Glassburner, (ed)., The Economy of Indonesia, dijelaskan pula bahwa setelah Undang-Undang Agraria 1890, setelah kapitalis - perkebunan berada dimana-mana di seluruh pelosok Jawa termasuk di daerah Sidoardjo maka pelapisan sosial yg berdasarkan perilikan tanah itu semakin bergeser ke bawah dan sejumlah bukti memperlihatkan bahwa sejumlah anggota komunitas di desa Jawa yang tidak memiliki tanah dan hampir tidak memiliki tanah, semakin lama semakin bertambah. (Karl J. Pelzer, "The Agricultural Foundation" dalam Bruce Glassburner (ed)., : 1971, 128-161).

Buku keempat karya S. Sigit Wahyudi yang berjudul Dampak Agroindustri Terhadap Persawahan di Jawa: Studi Kasus Gedangan Tahun 1904. Buku ini membahas bagaimana munculnya perubahan eksploitasi sosial ekonomi pada akhir abad XIX di Hindia Belanda termasuk sis -

tem persewaan tanah sejak jaman tanam paksa. Selanjutnya yang paling penting disini adalah membahas masalah perkebunan yang pernah menjadi andalan utama pemerintah Hindia Belanda ke pasaran Eropa, seperti tanaman kopi, teh, tembakau dan tebu. Dikatakan bahwa tanaman agroindustri tersebut dapat menghasilkan uang yang luar biasa yang dapat dipakai sebagai "gabus mengapung" perekonomian Hindia Belanda. Selanjutnya pada bab III dibahas pula mengenai bagaimana perkembangan perkebunan tebu dan pabrik gulanya, termasuk bagaimana sejarah tanaman tebu dan industri gulanya, munculnya sistem kerja bebas dan dinamika masyarakat perkebunan (S. Sigit Wahyudi: 1983, 40-100).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dilihat dari perspektif sejarah, kontrak Arends merupakan kejadian yang unik dan bersifat lokal. Oleh karenanya peristiwa ini penting untuk diteliti. Pertama, pengungkapan sejarah yang bersifat mikro akan sangat berguna dalam memperluas cakrawala yang ada hubungannya dengan peristiwa lain baik masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Kedua, walaupun terjadi pada tingkat lokal namun kontrak Arends merupakan salah satu tatanan yang ingin mengangkat petani dari penderitaan pajak walaupun banyak di salahgunakan oleh penguasa pribumi. Melalui pengkajian yang intens terhadap berbagai sumber, diharapkan dapat dipahami sejumlah persoalan tentang masyarakat petani yang masih kurang dibicarakan sejak masa lampau, kini, dan masa yang akan datang. Pepatah mengatakan "petani merupakan soko guru revolusi". Ketiga, secara obyektif akan dapat diambil manfaatnya yang positif oleh para pemegang kebijakan khususnya yang ada hubungannya dengan masalah tanah, perkebunan untuk mengurangi konflik.